

BAB III

GAMBARAN UMUM POS KEADILAN PEDULI UMAT

A. Profil Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU)

1. Sejarah Berdirinya Pos Keadilan Peduli Umat

Pada pertengahan tahun 1997, negara-negara ASEAN terpuruk oleh krisis ekonomi regional yang disebabkan oleh depresiasi mata uang terhadap dolar Amerika. Indonesia merupakan salah satu negara yang terparah diantara semua negara di Asia. Krisis tersebut sudah merambah ke berbagai bidang, seperti politik, moral, pendidikan, sains-teknologi, budaya, dan religi. Pendekatan multidisipliner untuk menangani krisis masih sangat kurang, karena egoisme sektoral yang kuat.

Menyikapi krisis yang berkembang sejumlah anak bangsa, yaitu Raden Bagus Suryama Majana Sastra, Sahabudin, Agung Notowiguno, dan Dedi Sularso, dengan ketetapan hati yang kuat bergandeng tangan dan bergerak menyumbangkan tenaga dan fikirannya melakukan aksi sosial di beberapa penjuru tanah air. Setelah melakukan berbagai aksi sosial, mereka kemudian menggagas entitas kepedulian publik yang dapat bergerak secara sistematis. Kemudian pada 10 Desember 1999 lahirlah lembaga swadaya masyarakat yang bernama Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) dengan badan hukum yayasan. PKPU menisbahkan dirinya sebagai lembaga yang bergerak di bidang sosial. Dalam pendiriannya, pada tanggal 8 Oktober 2001 berdasarkan SK. Menteri Agama No 441 PKPU telah ditetapkan sekaligus dikukuhkan sebagai Lembaga Amil Zakat

Nasional (LAZNAS). Hal itu membuktikan bahwa kepercayaan masyarakat kepada PKPU semakin besar. Pada hari Selasa, 22 Juli 2008, Lembaga Kemanusiaan Nasional PKPU telah memperoleh register di PBB sebagai lembaga dengan status *Special Consultative Status* dari *Economic and Social Council* (Ecosoc)

Seiring dengan meluasnya jangkauan kegiatan sosial yang terus disalurkan ke berbagai lapisan masyarakat di seluruh penjuru Indonesia serta besarnya dorongan masyarakat luas untuk bekerjasama dalam memberdayakan bangsa, maka pada tahun 2004, PKPU bertekad untuk membangun kemandirian rakyat Indonesia dengan memperluas lingkup kerjanya sebagai Lembaga Kemanusiaan Nasional.

Kiprah PKPU sebagai pegiat kemanusiaan terukir jelas dalam partisipasinya berdampingan dengan NGO (*Non-Government Organization*) internasional dari manca negara dalam mengatasi keadaan darurat tanggap bencana, serta fase pembangunan kembali pasca bencana-bencana besar yang menimpa tanah air kita. Gempa bumi dan tsunami di Aceh, Yogyakarta, serta beberapa peristiwa bencana lainnya, telah menunjukkan kiprah PKPU dalam penanganannya.

Sebagai lembaga yang berkomitmen dalam menangani isu-isu kemanusiaan global, maka tuntutan standarisasi kerja serta pengembangan program telah mencambuk PKPU untuk mengedepankan peningkatan mutu program dan layanan dengan menghasilkan kontribusi yang solutif bagi masyarakat. Tuntutan

tersebut dijawab dengan diterimanya PKPU sebagai ”*NGO in Special Consultative Status with the Economic and Social Council of the United Nations*” yaitu lembaga swasta yang ahli dalam menangani masalah di bidang ekonomi dan sosial pada tanggal 21 Juli 2008, hal ini menuntut akuntabilitas kinerja kemanusiaan secara periodik sebagai konsekuensi status yang disandang. Kemudian pada tahun 2010, PKPU juga telah resmi terdaftar sebagai Organisasi Sosial Nasional berdasarkan keputusan Menteri Sosial RI No 08/Huk/2010.

Sesuai SK. Menteri Agama RI nomor 423 tahun 2015, maka secara Nasional pada akhir tahun 2015 telah resmi LAZ PKPU melakukan *spin off* (pemisahan) pengelolaan zakatnya kepada Inisiatif Zakat Indonesia (IZI). Dengan ini, PKPU sudah tidak lagi mengelola zakat dan lebih fokus kepada bidang sosial kemanusiaan.

Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) yang telah resmi beroperasi pada 1 Januari 2016 dengan ini IZI dapat meneruskan dan mengembangkan aktivitas pengelolaan zakat yang sebelumnya telah dikelola oleh PKPU selama 16 tahun, dan kehadiran IZI ini tetap meneruskan visi dan misi lembaga kemanusiaan PKPU dan dilakukan sesuai amanat UU No 23 tahun 2011 tentang zakat, yaitu:

Di Indonesia, zakat diatur secara khusus pengelolaannya pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Menurut Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa dalam mengelola zakat terdapat 2 (dua) badan yang berhak mengelola zakat antara lain, yang pertama Badan Amil Zakat yang dikelola pemerintah

dan kedua Lembaga Amil Zakat yang dikelola masyarakat. Dalam konteks kehidupan bernegara 2 (dua) lembaga pengelola zakat ini sangatlah berperan penting dalam melaksanakan pengelolaan dana zakat, keduanya merupakan lembaga penting yang akan menentukan keberhasilan dari pengelolaan potensi ekonomi masyarakat Indonesia dan berperan penting untuk mewujudkan *syiar* agama islam. Sehingga 2 (dua) lembaga ini diharapkan mampu mengembangkan agar tujuan utama pengelolaan zakat dapat tercapai.

Dalam hal sumber dana, PKPU yang sudah tidak lagi menggunakan zakat, kini PKPU menggunakan sumber dana dari *Corporate Social Responsibility* (CSR), infaq, dan donatur baik donatur individu maupun donatur dari perusahaan.

2. Visi dan Misi Pos Keadilan Peduli Umat

Visi

Menjadi Lembaga Kelas Dunia yang Terpercaya Dalam Membangun Kemandirian

Misi

Misi Kemanusiaan yang kami lakukan meliputi kegiatan :

- a. Pendayagunaan: Mendayagunakan program kegawat daruratan, *recovery*, pemberdayaan dalam meningkatkan kualitas hidup dan membangun kemandirian.
- b. Kemitraan: Menjalinkan kemitraan dengan masyarakat, dunia usaha, pemerintah, media, dunia akademis dan organisasi masyarakat sipil *Civil Society Organization* (CSO)

lainnya atas dasar keselarasan nilai- nilai yang dianut lembaga.

- c. Riset & Pengembangan: Melakukan kegiatan studi, riset, pengembangan, dan pembangunan kapasitas yang relevan bagi peningkatan efektifitas peran Organisasi Masyarakat Sipil.
- d. Kerjasama: Berperan aktif dan mendorong terbentuknya berbagai forum kerjasama dan program sosial-kemanusiaan penting lainnya di level nasional, regional dan global.

3. Tujuan Perwujudan Visi dan Misi Pos Keadilan Peduli Umat

PKPU sebagai Lembaga Kemanusiaan Nasional mempunyai tujuan dari perwujudan visi dan misi yaitu:

- a. Terdepan dalam memberikan solusi masalah kemanusiaan
- b. Terbangunnya loyalitas donatur dan mitra dalam dan luar negeri.
- c. Terciptanya pengembangan lembaga sesuai dengan dinamika dan perkembangan masyarakat.
- d. Terbentuknya jaringan kerja dengan azas saling memberikan manfaat.
- e. Terbangunnya solidaritas dalam mengembangkan kemandirian masyarakat.

4. Nilai Budaya Pos Keadilan Peduli Umat

"Jujur, Tanggung Jawab, Kerja Sama, Cepat dan Peduli"

5. Aktifitas Lembaga Pos Keadilan Peduli Umat

- a. Pengumpulan Dana dan Bantuan Masyarakat
 - 1) Dana CSR perusahaan
 - 2) Dana khusus bencana kemanusiaan
 - 3) Pakaian, bahan makanan (sembako) dan obat-obatan.
 - 4) Dana hewan qurban
- b. Misi Penyelamatan Kemanusiaan
 - 1) Daerah-daerah bencana alam dan kemanusiaan
 - 2) Daerah kritis dan minus
- c. Rehabilitasi Kemanusiaan
 - 1) Rehabilitasi fasilitas kesehatan dan air bersih
 - 2) Rehabilitasi fasilitas pendidikan
 - 3) Rehabilitasi fasilitas ibadah
 - 4) Rehabilitasi fasilitas ekonomi
- d. Pembangunan Masyarakat
 - 1) Pemberdayaan ekonomi umat
 - 2) Pendidikan alternatif
 - 3) Pembangunan pelayanan kesehatan mandiri
 - 4) Distribusi hewan qurban

Keseluruhan aktivitas tersebut PKPU dedikasikan pada umat dan rakyat Indonesia untuk bersama “menggugah nurani menebar peduli” menggugah nurani siapa saja, dimana saja dan kapan saja untuk peduli pada nasib sesama dalam amal ibadah

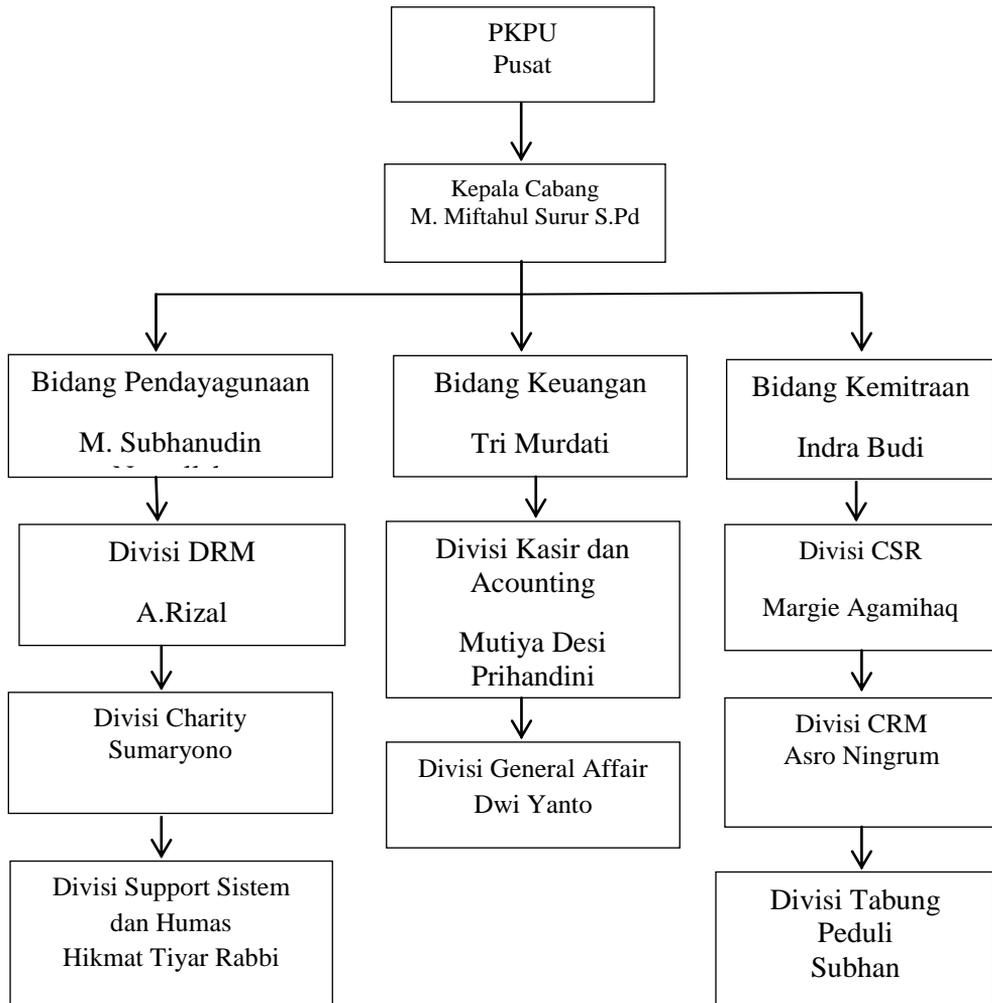
yang nyata, “karena yang terbaik diantara kita adalah yang paling besar kontribusinya terhadap sesama”.¹

6. Struktur Pengurus PKPU Cabang Semarang

Organisasi kepengurusan PKPU cabang Semarang dikepalai oleh seorang manajer atau kepala cabang dan di bantu oleh tiga bidang kepengurusan, yaitu bidang keuangan, bidang kemitraan, dan bidang pendayagunaan, ketiga bidang ini di bantu oleh beberapa divisi. Berikut struktur pengurus PKPU cabang Semarang:

¹[http:// www.PKPU.or.id](http://www.PKPU.or.id), diakses 29 Oktober 2016

Tabel 3.1
Struktur pengurus PKPU cabang Semarang



Sumber data: Wawancara dengan M. Subhanudin Nasrullah dan A.Rizal, (kepala bidang pendayagunaan dan divisi DRM PKPU cabang Semarang)

Dalam melaksanakan tugas kesehariannya, PKPU dibantu oleh kepala cabang dan 3 bidang kepengurusan, yaitu:

a. Kepala Cabang

Tugas seorang kepala cabang adalah memimpin dan mengelola kegiatan usaha atau bisnis perusahaan di cabang, membangun nama baik kantor cabang dengan image yang positif, mengupayakan pertumbuhan dan perkembangan cabang dari waktu ke waktu baik secara volume maupun kualitas. Kepala cabang juga mempunyai tanggung jawab terhadap perusahaan, yaitu sebagai pelaksanaan operasional kantor cabang sesuai sistem dan prosedur, pengendali resiko, pertumbuhan dan perkembangan cabang, merealisasikan profit yang ditargetkan di masing-masing cabang.

b. Bidang Keuangan.

Bidang ini bertugas mengurus administrasi PKPU, yang meliputi administrasi dokumen, pegawai, data donatur, masyarakat penerima bantuan dan mengurus inventaris peralatan kantor. Dalam melaksanakan tugasnya, bidang ini dibantu oleh 4 staf bagian, yaitu kasir bertugas mengurus pemasukan dari penghimpunan kemudian pengeluaran untuk didistribusikan keuangan, akuntan bertugas melakukan pencatatan proses akuntansi organisasi yang dimulai sejak penjurnalan sampai dengan pembuatan laporan keuangan, personalia dan sekretaris bertugas mengelola administrasi, mengelola inventaris peralatan

kantor dan membuat notulen rapat seperti alat transportasi PKPU dan tentang laporan keuangan terlampir.

c. Bidang Kemitraan.

Tugas dari bidang ini adalah mengurus pengumpulan dana, baik dana donatur, Infaq dan CSR. Bidang ini juga mengurus *press release* kegiatan dan program melalui *pamflet*, spanduk, media masa dan juga mengadakan seminar dan pelatihan mengenai sosial kemanusiaan.

d. Bidang Pendayagunaan.

Bidang ini bertugas penyaluran dana bantuan yang berasal dari dana donatur, Infaq dan CSR kepada para masyarakat yang membutuhkan melalui program sekaligus mengurus masalah jalannya program untuk peningkatan kualitas SDM masyarakat dengan memberikan pelatihan sesuai dengan potensi desanya tersebut.

B. Program-Program PKPU Cabang Semarang

PKPU Semarang memiliki program-program dalam berbagai bidang untuk menuju visi dan misinya, yaitu:

1. Bidang Kesehatan

a. SEHATI (Kesehatan Keluarga dan Buah Hati Indonesia)

SEHATI yaitu penyuluhan kesehatan yang dikhususkan untuk ibu dan anak dengan pemeriksaan kesehatan gizi anak dan balita, ibu hamil dan menyusui, Pemberian Makanan Tambahan (PMT).

b. PROSMILING (Program Kesehatan Keliling)

Penyuluhan kesehatan umum, pemeriksaan dan pengobatan umum keliling di kota Semarang.

c. Khitan masal

Khitanan Massal yaitu program khitanan gratis untuk masyarakat miskin.

d. Air bersih

Program Air bersih yaitu pengadaan fasilitas sumber air bersih berupa sumur gali, sumur pompa, sumur bor-listrik, *sumur ram pump System*, dan pembuatan MCK Portable yaitu penyediaan fasilitas sanitasi dasar berupa MCK yang dikemas dalam bentuk bilik kecil yang dapat dibawa atau diangkut (portable). bagi masyarakat tidak mampu.

e. Kampung nutrisi

Kampung nutrisi adalah bentuk kelompok binaan berbasis lingkungan yang menitik beratkan pada peningkatan pengetahuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan penanaman tanaman sehat seperti sayur-sayuran, buah-buahan, dan apotik hidup.

f. Klinik peduli

fasilitas penyedia layanan kesehatan yang komprehensif dimana meliputi aspek kuratif (pengobatan), preventif (pencegahan), dan promotif (promosi kesehatan).

2. Bidang Pendidikan

a. Beasiswa nusantara

Beasiswa nusantara adalah program bantuan dana tunai yang diberikan khusus kepada siswa sekolah dari kalangan masyarakat tidak mampu, guna meringankan biaya sekolah mereka.

b. Bedah sekolah

Bedah sekolah yaitu program rehabilitasi dan rekonstruksi sekolah-sekolah yang “dianggap” tidak layak untuk melakukan proses belajar mengajar.

c. Training guru

Program peningkatan kapasitas guru berupa pelatihan komprehensif.

3. Bidang Tanggap Darurat

a. Kampung tangguh

Pelatihan bencana adalah pelatihan tanggap bencana komprehensif dalam 4 sesi pertemuan. Program ini bertujuan untuk masyarakat bisa tangguh dalam mengetahui resiko terjadinya bencana.

b. RESCUE (Respon Cepat Untuk Evakuasi)

Aksi cepat tanggap untuk evakuasi adalah program bantuan relawan dan logistik yang bekerjasama dengan Badan *Search And Rescue* Nasional (BASARNAS) untuk membantu korban bencana.

- c. Rescue medis
Program berupa bantuan pengobatan untuk para korban bencana.
 - d. Dapur air
Penyediaan air bersih dan air hangat untuk penyediaan susu untuk balita, anak-anak dan ibu hamil serta menyusui. Penyediaan makanan untuk bayi dan balita, dan penyediaan makanan cepat saji untuk umum bagi korban bencana.
 - e. Serambi nyaman
Program yang dirancang untuk memberikan sarana tempat tinggal sementara bagi para pengungsi bencana.
 - f. Rumah senyum
Rumah darurat adalah pembuatan sarana tempat tinggal berupa rumah sederhana setelah terjadinya bencana, bekerjasama dengan perusahaan swasta maupun pemerintah.
 - g. Sekolah inisiatif
Pembuatan sarana pendidikan berupa sekolah sederhana setelah terjadinya bencana, bekerjasama dengan perusahaan swasta maupun pemerintah.
4. Bidang *Social Services*
- a. *La tahzan*
La tahzan adalah program pelayanan berupa ambulan bagi masyarakat untuk layanan antar jemput jenazah dan orang sakit.

- b. Wisata yatim
Program yang khusus diberikan untuk membahagiakan anak yatim dengan mengajak mereka berwisata ke tempat wisata.
 - c. Belanja Bareng Yatim (BBY)
Program santunan anak yatim yang dikemas dalam bentuk kegiatan belanja kebutuhan sehari-hari atau saat hari raya.
 - d. Klaster berdaya
Klaster berdaya merupakan program yang diterapkan pada tingkat individu, keluarga maupun lingkungan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kemampuannya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan yang berkelanjutan.
 - e. TAF AQUR (Tabungan Fasilitas Qurban)
Program untuk persiapan dana qurban sejak awal yang lebih ringan, karena dapat menabung sesuai dengan kondisi keuangan masyarakat.
5. Bidang *Microfinance and Economy Empowerment*
- a. PIK (Pusat Inkubasi Kemandirian)
Program pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat kurang mampu untuk bisa membangun suatu usaha.
 - b. KUMM (Kelompok Usaha Mandiri Masyarakat)
Program pemberdayaan usaha mikro dengan membentuk suatu kelompok binaan yang beranggotakan masyarakat yang kurang mampu dalam modal usaha namun sudah mempunyai usaha tertentu di wilayah-wilayah binaan PKPU kota Semarang.

C. Mitra dan Jejaring PKPU Cabang Semarang

Dari tahun ke tahun, PKPU membangun kerjasama dengan berbagai lembaga, pemerintah maupun perusahaan-perusahaan melalui kegiatan bersama seperti pelatihan rehabilitasi pasca bencana, dan aktivitas CSR perusahaan seperti pengembangan komunitas hijau, khitanan massal maupun pengobatan gratis di pelosok Jawa Tengah. Adapun mitra-mitra PKPU yang telah bekerjasama antara lain:

1. Perusahaan milik swasta

PT. Telkomsel Jateng-DIY, PLN APJ Jateng, PT. Pertamina, PT. Indonesia Power, PT. Bintang Toejoe, PT. POS Indonesia, Radar Semarang, Koran Sindo Jateng-DIY, PT. Nufarindo, PT. Indofood, PT. Sucofindo cabang Semarang, PT. Sari Husada, Exxon Mobil, Bank Mu'amalat, MarkPlus, Toha Putra Centre, dan Carrefour.

2. Perusahaan milik pemerintah

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kota Semarang, Dinas Pendidikan Kota Semarang, Polrestabes Semarang, Bank Mandiri, dan BRI.

3. Perguruan tinggi

Universitas Negeri Semarang, Universitas Semarang, Universitas PGRI Semarang, Stikubank, Universitas Diponegoro, dan lebih dari 40 Sekolah tingkat TK-SD sampai SMA.

4. Lembaga luar negeri

PKPU secara Nasional telah menjalin kerja sama dengan beberapa lembaga Internasional, Unicef, IGMG, IHH Germany,

North American Muslim Foundation, IHH Turkey, Islamic Relief, Human Appeal International Australia, KMMI Jepang, dan banyak lagi.

5. Jejaring Nusantara

Jejaring PKPU cukup tersebar di beberapa provinsi di nusantara: PKPU Aceh PKPU Medan PKPU Padang PKPU Bukit Tinggi PKPU Bengkulu PKPU Bandung PKPU Surabaya PKPU Yogyakarta PKPU Makassar PKPU Kendari, PKPU Manado PKPU Balikpapan PKPU Maluku Utara PKPU Maluku.

6. Kantor Cabang Pembantu Jawa Tengah

KCP Boyolali, KCP Kota Tegal, KCP Karanganyar, KCP Kudus dan KCP Purwokerto

7. Alamat PKPU Semarang Jawa Tengah

Alamat Kantor : Jl Setiabudi No 70. Semarang
 Telp/ Fax : (024) 70787578/ (024) 7477405
 Blog : PkpuSemarang.blogspot.com
 Twiter : @Pkpu semarang
 FB : Pkpu Semarang
 E-mail : pkpujateng@yahoo.com
 Situs : www.pkpu.or.id

D. Pendistribusian Dana Pos Keadilan Peduli Umat

Pos Keadilan Peduli Umat dalam mendistribusikan dana donatur, CSR, dan infaq, PKPU masih menggunakan sistem seperti halnya golongan penerima zakat. Terdiri dari fakir, miskin, amil,

muallaf, *raqab*, *gharimin*, *fisabilillah* dan *ibnu sabil*. Dalam pendistribusian dana PKPU yang lebih diprioritaskan adalah golongan fakir miskin. Golongan inilah yang dianggap paling membutuhkan.²

Dari pengalaman di lapangan, PKPU memiliki keunggulan untuk mendistribusikan dana dalam program yang sifatnya perlu penanganan cepat seperti peristiwa gempa, banjir dan sebagainya. selain itu, dalam penanganan bencana alam PKPU melaksanakan program lanjutan dalam bentuk rehabilitasi dan pembangunan komunitas.

Dalam pendistribusian dana, ada empat payung program yang meliputi empat bidang yaitu kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sosial. Dalam pendistribusian bantuan ke wilayah lain, PKPU turun langsung kelapangan atau bekerjasama dengan pihak lain seperti dengan lembaga organisasi lain, yang disebut dengan mitra PKPU atau cabang PKPU yang ada di daerah-daerah khususnya daerah Jawa Tengah.

Dana yang digunakan PKPU untuk program pemberdayaan adalah sekitar 15% dari jumlah total dana yang ada dan yang 85% lainnya digunakan untuk penyelamatan umat manusia, seperti bencana alam, membantu daerah-daerah minus, dan kegiatan rehabilitasi. Karena dalam penyaluran dana, lembaga ini taat kepada peruntukan yang diniatkan oleh mereka yang memberi. Dana semacam ini diistilahkan sebagai dana terikat. Jika pemberi donatur menyatakan

² Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Rukun Islam Ibadah Tanpa Khilafah Zakat*, Jakarta: Indocamp, 2008, h. 10-11

bahwa dana yang ia berikan untuk diserahkan misalnya kepada korban konflik, maka PKPU akan menyampaikan sesuai dengan yang diamanatkan. Seandainya donatur menyerahkan dana kepada PKPU tanpa tujuan tertentu lembaga ini pada umumnya mendistribusikannya untuk pemberdayaan masyarakat terutama dalam rangka pembangunan ekonomi masyarakat.

E. Peran PKPU dalam Pembangunan Ekonomi

Pos Keadilan Peduli Umat Semarang sebagai Lembaga Kemanusiaan Nasional dalam pemberdayaan demi terwujudnya visi PKPU yaitu menjadi lembaga terpercaya dalam membangun kemandirian terutama kemandirian ekonomi masyarakat. Upaya mewujudkan pembangunan kemandirian masyarakat terutama dalam bidang ekonomi maka di aplikasikan dalam bentuk program yaitu program KUMM (Kelompok Usaha Mandiri Masyarakat).

1. KUMM (Kelompok Usaha Mandiri Masyarakat)

KUMM (Kelompok Usaha Mandiri Masyarakat) adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan membentuk kelompok binaan yang beranggotakan beragam usaha mikro di satu wilayah binaan PKPU. Dengan tujuan membantu usaha mikro meningkatkan kapasitas usahanya dan membebaskan pelaku usaha mikro dari jeratan rentenir. Adapun KUMM yang diselenggarakan oleh PKPU cabang Semarang berkerja sama dengan perusahaan-perusahaan baik swasta maupun pemerintah untuk para kaum dhuafa. Sebanyak minimal 10 peserta di setiap kelompok yang terpilih.

a. Tujuan KUMM (Kelompok Usaha Mandiri Masyarakat)

KUMM bertujuan meningkatkan taraf hidup sosial ekonomi rumah tangga anggota yaitu dengan:

- 1) Mempelajari bersama serta menanamkan pengertian tatalaksana ekonomi yang sehat, baik ekonomi bersama diantara para anggota.
- 2) Mengembangkan sikap ekonomi yang sehat diantara anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya serta lebih sadar diri dan bertanggung jawab terhadap kelompoknya.
- 3) Memberikan pelayanan kepada para anggota baik dalam kebutuhan usaha maupun rumah tangga
- 4) Membina mengembangkan usaha dalam bidang organisasi, produksi, pemasaran, keuangan, dan sumberdaya manusia.

b. Prinsip-prinsip KUMM (Kelompok Usaha Mandiri Masyarakat)

Kerjasama dalam bidang sosial ekonomi tersebut perlu pertimbangan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) KUMM adalah perkumpulan orang dan bukan semata-mata merupakan kumpulan modal
- 2) Menjadi anggota KUMM berdasarkan kesadaran, bersifat sukarela, dan terbuka untuk umum.
- 3) Berusaha atas dasar prinsip demokrasi, partisipasi, keterbukaan dan keadilan.
- 4) Bertujuan meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi anggota dan masyarakat sekitarnya.
- 5) Mengadakan pertemuan anggota secara teratur.

6) Mengadakan tabungan secara teratur.

c. Kegiatan KUMM

- 1) Mengupayakan baik keterampilan dan pengetahuan kepada calon anggota, anggota dan pengurus yang berwawasan gender secara teratur sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan.
- 2) Menyelenggarakan tabungan secara teratur dan terarah
- 3) Mengupayakan pelayanan kredit terutama bagi usaha-usaha produktif dengan cara yang tepat.
- 4) Mengembangkan usaha-usaha di bidang produksi, pemasaran, serta usaha-usaha pelayanan kebutuhan usaha dan keluarga.
- 5) Mengembangkan manajemen KUMM.
- 6) Mengembangkan dan bekerjasama dengan kegiatan masyarakat berdasarkan kesetiakawanan yang menunjang pertumbuhan dan pengembangan KUMM.

d. Keanggotaan

- 1) Syarat-syarat menjadi anggota:
 - a) Berusia minimal 18 tahun
 - b) Bersedia mentaati pedoman KUMM
 - c) Bersedia bekerjasama dengan anggota lain dengan prinsip tanggung renteng
 - d) Tidak merangkap anggota KUMM lain, kecuali atas persetujuan pengurus KUMM yang bersangkutan.
 - e) Sanggup melakukan kewajiban-kewajiban serta hak-haknya sebagai anggota seperti tercantum dalam peraturan dasar KUMM.

- 2) Kewajiban anggota:
- a) Mengamalkan dan mengembangkan KUMM sesuai prinsip dasar KUMM
 - b) Mentaati dan melaksanakan peraturan dasar KUMM
 - c) Membela kepentingan dan nama baik KUMM
 - d) Ikut hadir dan aktif mengambil bagian dalam pertemuan anggota serta mentaati keputusan-keputusannya.
 - e) Menabung secara teratur
 - f) Mencari anggota baru
 - g) Ikut menanggung resiko di setiap KUMM

Gambar 3.1
Pertemuan Rutin Anggota KUMM



Sumber Dokumentasi Divisi Ekonomi

Program KUMM termasuk salah satu program unggulan PKPU di tingkat nasional, yang dilaksanakan di beberapa cabang pembantu yang tersebar di Indonesia, salah satunya PKPU cabang Semarang. Di sini, PKPU berperan sebagai Fasilitator antara donatur

dengan masyarakat kurang mampu. Hal ini terkait terlaksananya visi dan misi PKPU dalam membangun kemandirian umat. KUMM adalah suatu program dalam bentuk pinjaman modal bergulir kepada masyarakat yang digunakan untuk usaha melalui pendampingan rutin dari pengurus PKPU selama 10 bulan. Hal ini bertujuan untuk mengawasi, memberi motivasi dan mengevaluasi tentang siklus pengguliran dana pinjaman sebagai modal usaha yang digunakan oleh anggota KUMM.

Tempat pelaksanaan Program KUMM dilaksanakan di daerah yang mudah dijangkau oleh anggota yaitu di kantor PKPU, ketika lingkungan anggota dekat dengan kantor PKPU sedangkan ketika jauh dari kantor PKPU pelaksanaan pembinaan bisa dilakukan di lingkungan perumahan tempat tinggal anggota KUMM. Penggunaan modal KUMM digunakan untuk mengembangkan usaha seperti di lapak-lapak, warung kelontong, pedagang kaki lima, industri rumah tangga, dan lainnya.

Program KUMM merupakan salah satu program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh bidang pendayagunaan. Pada setiap divisi di bidang pendayagunaan dijabat oleh satu SDM yang bertugas sebagai perencana dan pelaksana program, sedangkan yang bertindak sebagai pengawas adalah ketua bidang pendayagunaan. Adapun fungsi dari setiap SDM dari bidang pendayagunaan dalam jalannya program yaitu *Pertama*, sebagai fasilitator. Fasilitator memfasilitasi para *mustahik* ketika masih dalam pendampingan dari PKPU. Pendampingan dilakukan dengan cara: menyediakan

perlengkapan pelatihan, materi pelatihan, modal pelatihan dan pelatih atau pendamping. *Kedua*, sebagai konsultan ketika peserta sudah lepas dan mandiri. Konsultasi dilakukan terkait perizinan anggota baru, perumusan penyelesaian masalah masyarakat yang menyangkut usaha.

F. Faktor-Faktor Penghambat dan Pendukung Kinerja PKPU

Dalam melaksanakan program-program, PKPU mengalami kendala atau hambatan. Khususnya pengurus PKPU divisi program KUMM dari setiap divisi ekonomi mengalami hambatan baik hambatan internal maupun eksternal.

1. Berikut Kendala eksternal yang meliputi masyarakat penerima manfaat program KUMM
 - a. Masih lemahnya motivasi usaha para anggota
 - b. Minimnya modal yang diperoleh sehingga kesulitan untuk pengembangan usaha
 - b. Dalam melaksanakan usahanya ada kesan kurang sabar dari anggota
 - c. SDM yang berpendidikan rendah
 - d. Sebagian besar anggota belum memiliki rencana untuk pengembangan usaha, ada kesan anggota sudah merasa puas dengan usaha yang dilakukannya sekarang.
 - e. Pelatihan usaha yang diberikan dari lembaga tidak diaplikasikan oleh peserta ketika di lapangan.
 - f. Pelaku usaha belum matang dalam pencatatan anggaran keuangan sehingga ketika modal yang diberikan untuk usaha

belum bisa menutup atau menghitung keuntungan untuk kebutuhan usaha kembali sehingga antara keuangan rumah tangga dan usaha tercampur, kadang hasil usaha untuk membeli barang minus terpaksa ditambah dengan dana rumah tangga.

- g. Pelaku usaha sering mengganti-ganti barang dagangannya sehingga mengakibatkan dana yang berputar tidak seimbang.
 - h. Pelaku usaha belum bisa memproyeksi barang yang didagangkan dengan lingkungan konsumen sehingga barang tersebut tidak laku mengakibatkan modal berhenti dan terjadi defisit.
2. Dari faktor internal yang meliputi Lembaga PKPU sebagai fasilitator dan pengawas.
- a. Kurangnya pengawasan dalam penggunaan dana modal untuk kegiatan produktif hanya mengandalkan akad dan ketua koordinasi. Sehingga dalam perjalanan tentang penggunaan dana untuk usaha tidak dapat diketahui secara langsung di lapangan tentang pengembangan usahanya dan masalah-masalah masyarakat yang dialami dalam menjalankan usahanya serta dalam pengembalian modal.
 - b. Kurangnya Perhatian lembaga terhadap masyarakat yang sudah menerima manfaat dan mandiri dalam permodalan sehingga kurang ada komunikasi atau survey lanjutan secara langsung untuk memastikan bahwa dana tersebut sudah tepat

guna dan melihat kondisi masyarakatnya secara langsung yang sudah lepas dari bimbingan PKPU.³

³ Wawancara dengan M. Subhanudin Nasrullah dan A.Rizal, (Kepala bidang Pendayagunaan dan devisi DRM PKPU Cabang Semarang), 28 Oktober 2016

